



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

# **RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022**



**2021**



# KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar Tahun 2022 dapat diselesaikan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk wajib menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 mengalami penyesuaian yang diakibatkan oleh karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan refofusing dan realokasi anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19. Penyesuaian ini telah dituangkan kembali dalam Rancangan Kerja perubahan tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.

Di sisi lain penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) tahun 2022 ini merupakan masa transisi peralihan dari Renstra 2016 – 2021 Bappeda menuju renstra baru yaitu periode 2022 – 2026 serta menyesuaikan juga dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022 ini. Dokumen Renja Bappeda Kota Denpasar yang sudah tersusun ini, diharapkan dapat menjadi dasar/acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Bappeda Kota Denpasar.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, 18 Juni 2021  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Denpasar

**I Putu Wisnu Wijaya Kusuma.ST.MT**  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19671007 199703 1 004



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika .....	5
<b>II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2020 .....</b>	<b>9</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Bappeda Tahun 2020 dan Capaian Renstra Bappeda.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda .....	41
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	52
<b>3. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA.....</b>	<b>58</b>
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	58
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Bappeda .....	59
3.3. Program dan Kegiatan .....	60
<b>4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA .....</b>	<b>73</b>
4.1. Program dan Kegiatan.....	73
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel I	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Denpasar.....	14
Tabel II	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Denpasar .....	20
Tabel III	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar .....	40
Tabel IV	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 .....	44
Tabel V	Usulan Program dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022.....	53
Tabel VI	Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	60
Tabel VII	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 .....	63



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Struktur Organisasi Bappeda Kota Denpasar .....	36
---	----





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan. Sebagai tindak lanjutnya, kepala Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta mengacu pada hasil Musrenbang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar Tahun 2022. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.





Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja yang disusun pada masa transisi dari Renstra 2016- 2021 Bappeda Kota Denpasar menuju Renstra 2022- 2026 Bappeda Kota Denpasar. Penyusunan Renja ini selain mengacu pada Renstra Bappeda 2022 – 2026 yang akan segera disusun juga tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , Renja Perangkat Daerah adalah meliputi :

- a. Penyusunan Persiapan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah





- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 3465);
- b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4421), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
- c. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
- d. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- e. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 ) ;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang –





Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 10);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang





---

Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- o. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2 );
- p. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005– 2025;
- q. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar ( Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 8 );
- r. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;





### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Bappeda Kota Denpasar sebagai bentuk cerminan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang akan ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2022 – 2026. Namun dalam penyusunan Ranwal Renja ini masih mengacu kepada Renstra Bappeda Tahun 2016 – 2021 dan akan disesuaikan setelah penetapan Renstra Bappeda Tahun 2022- 2026.

Didalam Rencana Kerja (RENJA) ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dan akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Adapun Tujuan penyusunan Renja Bappeda adalah :

Sebagai komitmen bagi Bappeda dalam melaksanakan Program/kegiatan dan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu periode tahunan;

1. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda Kota Denpasar selama tahun 2022;
2. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan pada tahun 2022.

### **1.4. SISTEMATIKA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Bappeda,





proses penyusunan Renja Bappeda, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Bappeda dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2020 dan Capaian Renstra Bappeda,**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda,**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda**

Berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bappeda, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi,





Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, serta Tantangan dan peluang.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan Bappeda.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN BAPPEDA**

#### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda,**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda.

#### **3.3. Program dan Kegiatan,**

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA**

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kota Denpasar





## **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.





## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program / kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappeda Kota Denpasar tahun 2021 didasarkan pada Perubahan Renstra 2016-2021 dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Denpasar Tahun 2016-2021, untuk mengetahui :

1. Faktor – factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah ; dan
3. Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor – factor penyebab tersebut.

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA**

Evaluasi Kinerja Bappeda merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara lebih langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator output.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja





Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Denpasar selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran. Selain itu, program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka program-program yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Tahun 2020 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Perencanaan Tata Ruang
5. Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah dan Besar
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan adalah penjabaran dari program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dalam rangka mencapai outcome yang telah ditetapkan. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (SDM) barang/modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk





barang/jasa. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tahun 2020 adalah:

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
  1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
  1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**
  1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- **Program Perencanaan Tata Ruang.**
  1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW.
- **Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah dan Besar**
  1. Review Masterplan Persampahan Berdasarkan Studi Kelayakan
  2. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.
- **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
  1. Penyusunan Rancangan RKPD
  2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
  3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah
  4. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD
  5. Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  6. Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**
  1. Koordinasi Forum Skill Development Centre
- **Program Perencanaan Sosial Budaya**
  1. Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

#### **2.1.1. Realisasi Program dan Kegiatan**

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 8 (Delapan) program dan 14 (Empat Belas)





kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.264.657.747 ,- ( Sepuluh milliardi dua ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

Secara umum Realisasi kegiatan Bappeda tahun 2020 sampai dengan triwulan ketiga (Bulan Nopember 2020) dapat disajikan sebagaimana berikut:

**Target :**

<b>1</b>	<b>Belanja tidak langsung</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.111.748.800</b>
	- Belanja pegawai	Rp.	6.111.748.800
<b>2</b>	<b>Belanja langsung</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.152.908.943</b>
	- Belanja Pegawai	Rp.	1.293.600.000
	- Belanja barang dan jasa	Rp.	2.792.308.943
	- Belanja Modal	Rp.	67.000.000

**Realisasi :**

<b>1</b>	<b>Belanja tidak langsung</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.984.719.092</b>
	- Belanja pegawai	Rp.	5.984.719.092
<b>2</b>	<b>Belanja langsung</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.755.966.763</b>
	- Belanja Pegawai	Rp.	1.281.800.000
	- Belanja barang dan jasa	Rp.	2.414.580.763
	- Belanja Modal	Rp.	59.586.000

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :





Tabel 2.1.  
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan  
Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Denpasar

Program/Kegiatan		Target		Realisasi			
		Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
		Volume	(Rp)	Volume	(%)	Volume	(%)
<b>Belanja Tidak Langsung</b>							
1	Belanja Pegawai	100,00%	6.111.748.800,00	74,33%	74,33%	5.984.719.092	90,03%
<b>Belanja Langsung</b>							
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	2.830.974.638,00	85,00%	85,00%	2.703.943.512	83,53%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	415.208.000,00	85,00%	85,00%	316.882.901	62,51%
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>							
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100,00%	50.000.000,00	100,00%	100,00%	47.708.800	95,42%
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>							
1	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	100,00%	73.681.900,00	23,43%	23,43%	63.645.400	18,21%
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							
1	Penyusunan Rancangan RKPD	100,00%	103.123.900,00	95,00%	95,00%	86.455.900,00	88,84%
2	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	100,00%	102.338.350,00	100,00%	100,00%	90.590.750,00	88,52%
3	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	100,00%	23.254.000,00	80,00%	80,00%	22.596.500,00	93,73%
4	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	100,00%	355.197.570,00	85,00%	85,00%	290.020.800,00	78,13%





# Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar 2022

5	Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	100,00%	6.326.000,00	85,00%	85,00%	4.401.000,00	69,57%
6	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	#DIV/0!
<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>							
1	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100,00%	116.601.000,00	90,00%	90,00%	99.916.000,00	71,33%
<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>							
1	Koordinasi Forum Skill Development Centre	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar</b>							
1	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	100,00%	27.410.200,00	11,78%	11,78%	23.833.200	48,10%
2	Review Masterplan Persampahan Berdasarkan Studi Kelayakan	100,00%	6.210.825,00	20,00%	20,00%	5.972.000,00	96,15%
<b>Total</b>		<b>100,00%</b>	<b>10.264.657.747,00</b>			<b>9.740.685.855,00</b>	<b>94,90 %</b>

\*Data yang tercantum pada table 2.1 merupakan data realisasi sd Bulan Desember 2020.





### **2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar pada tahun 2020 mengalami hambatan sehingga realisasi hasil dan keluaran pada beberapa program dan kegiatan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana kerja tahun 2020. Adapun beberapa program kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, antarlain:

a. Program Perencanaan Tata Ruang;

Dalam Rencana Kerja Bappeda tahun 2020 Program Perencanaan Tata Ruang dijabarkan kedalam Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW. Hasil/keluaran yang ditetapkan adalah tersedianya dokumen Pendampingan Legalisasi Perda RTRW dan Tersedianya Buku Perda RTRW Kota Denpasar. Namun realisasi yang bisa dicapai hanya tersedianya Legalisasi Perda RTRW sehingga persentase capaian kinerja pada program/kegiatan ini sebesar 50% dari target kinerja.

b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

Dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020 Program Perencanaan Pembangunan Daerah dijabarkan kedalam 6 (enam) kegiatan. Salah satu kegiatan yang tidak dapat mencapai target adalah kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Keluaran dan hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut adalah tersedianya aplikasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2020 hanya sebesar 83,3% dari target yang telah ditetapkan.

c. Program Pembangunan Ekonomi;

Dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dijabarkan kedalam kegiatan Koordinasi Forum Skill Development Centre. Hasil/keluaran yang ditetapkan adalah tersedianya Laporan Pelaksanaan Forum Skill Development Centre. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak dapat berjalan sesuai dengan target yang





telah ditentukan.

d. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota menengah dan Besar;

Dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dijabarkan kedalam 2 (dua) kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Review Masterplan Koordinasi Forum Skill Development Centre. Hasil/keluaran yang ditetapkan adalah tersedianya Dokumen Masterplan Persampahan. Namun dalam pelaksanaannya persentase capaian kinerja kegiatan ini hanya sebesar 20%. Sedangkan pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan, hasil/keluaran yang ditetapkan adalah Dokumen RIPJM Bidang Cipta Karya dan Laporan Koordinasi Kawasan Kumuh Kota Denpasar. Namun dalam pelaksanaannya persentase capaian kinerja pada kegiatan ini hanya sebesar 50%.

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dijabarkan kedalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Hasil/keluaran yang ditetapkan adalah jumlah sumberdaya aparatur yang mengikuti diklat kompetensi. Namun dalam pelaksanaannya persentase capaian kinerja kegiatan ini hanya sebesar 20%.

Program/kegiatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah disesuaikan kembali indikator kinerjanya didalam Rencana Kerja Perubahan tahun 2020. Sehingga realisasi program/kegiatan tahun 2020 jika dibandingkan dengan rencana Kerja Perubahan tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah disesuaikan dalam Rencana Kerja Perubahan tahun 2020.

**2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dari 8 program dan 14 kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, terdapat 11 program dan 23 kegiatan yang telah memenuhi target/kinerja yang





ditetapkan, antara lain;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dijabarkan pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Hasil/keluaran yang ditetapkan adalah frekwensi pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran. Adapun persentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu sebesar 90%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dijabarkan pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Hasil/keluaran yang ditetapkan adalah frekwensi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, perawatan kendaraan roda 4 dan perawatan kendaraan roda 2. Adapun persentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu sebesar 95%.

c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

Dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020 Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan kedalam 6 (enam) pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Hasil/keluaran yang ditetapkan adalah frekwensi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, perawatan kendaraan roda 4 dan perawatan kendaraan roda 2. Adapun persentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu sebesar 95%.

d. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;

Perkiraan pencapaian untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2021 dengan dana sebesar Rp. 4.110.326.383 (Empat Miliar Seratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah ) yang terdiri dari 8 ( delapan) program dan 14 (empat belas) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut diharapkan keberhasilan kinerja dapat tercapai dengan maksimal. Dampak dari pandemi Covid – 19 terdapat realokasi dan recovusing anggaran, sehingga beberapa kegiatan





anggarannya dipangkas dan ditiadakan di tahun 2020.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai berikut :

- Minimnya data dan tidak tertibnya laporan Perangkat Daerah akan sangat berdampak pada ketetapan waktu dalam proses dan penetapan dokumen perencanaan.
- Kemampuan dalam perumusan Kebijakan
- teknis perencanaan pembangunan Kota Denpasar masih belum maksimal.
- Kerjasama dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel masih lemah.
- Data base yang belum akurat dan terstruktur sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan.
- Bappeda tupoksinya mengkoordinasikan program kegiatan Perangkat Daerah, dilain pihak petugas perencana di Perangkat Daerah belum maksimal sehingga berdampak pada kinerja Bappeda sendiri.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.



**Tabel 2.2.**

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGATAN S/D DENGAN TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
						(Permendagri No. 90 tahun 2019)									
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN						100%		
						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
						Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	95%	100%	90%				
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	99%	100%	95%				
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									
						Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%	100%	100%				



KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGATAN S/D DENGAN TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
						(Permendagri No.90 tahun 2019)									
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	01	01	2	06	02	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor						100%		
5	01	01	2	08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	01	01	2	08	04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor						100%		
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah									
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						100%		
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpeliharanya peralatan dan mesin kantor						100%		
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									



KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGATAN S/D DENGAN TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
5	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpeliharanya kendaraan dan pajak kendaraan dinas jabatan						100%		
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharanya gedung kantor						100%		
						PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG									
						Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW	Persentase perencanaan tata ruang yang diundangkan	100%	99%	100%	20%				
						PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR									
						Review Masterplan Persampahan Berdasarkan Studi Kelayakan				100%	100%				
						Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Persentase perencanaan sarana dan prasarana perkotaan yang ditindaklanjuti dengan DED	100%	100%	100%	100%				
						PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
						Pengembangan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam perencanaan	100%	100%						



KODE						URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGATAN S/D DENGAN TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
							pembangunan daerah (RKPD)								
						Penyusunan Rancangan RKPD	Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah (RKPD)	100%	100%	100%	100%				
						Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai pedoman/aturan	100%	100%						
						Penetapan RKPD	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai pedoman/aturan	100%	100%						
						Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersedianya laporan pertanggung jawaban Walikota untuk menunjang Good Governance	100%	100%	100%	100%				
						Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	93%	100%	100%				
						Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Buku laporan kinerja instansi pemerintah Kota Denpasar	100%	100%						
						Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Terkoordinasinya hasil kajian lingkungan hidup	100%	100%						



KODE	URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGATAN S/D DENGAN TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
						strategis								
						Tersedianya dokumen rancangan teknokratik RPJMD sebagai dasar penyusunan rancangan awal RPJMD			100%	100%				
						Terkoordinasinya hasil perencanaan pembangunan jangka menengah daerah	-	-						
						Tersedianya dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021	-	-						
						Tersedianya dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021	-	-						
						Penetapan Perubahan RPJMD								
						Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	100%				
						Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-				
						(Permendagri No. 90 tahun 2019)								
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN,								



KODE						URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGATAN S/D DENGAN TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
						PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan									
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Terkoordinasinya hasil perencanaan pembangunan						100%		
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Kota Denpasar; Dokumen RPJMD Kota Denpasar						2 dokumen; 1 dokumen		
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisa data dan informasi perencanaan pembangunan Kota Denpasar						1 dokumen		
5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
5	01	02	2	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD						100%		
						PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI									
						Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian Dan Perikanan	Penjabaran konsistensi program RKPD ke APBD bidang ekonomi dan SDA pada sub bidang lingkungan hidup, pertanian dan perikanan	100%	95%						
						Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata	Penjabaran konsistensi program RKPD	100%	98%						



KODE						URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGATAN S/D DENGAN TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
							ke APBD bidang ekonomi dan SDA								
						Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi	Penjabaran konsistensi program RKPD ke APBD bidang perekonomian dan SDA pada sub bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi	100%	95%						
						Koordinasi Forum Skill Development Centre	Jumlah koordinasi dan laporan forum skill development centre	100%	95%	-	10%				
						(Permendagri No. 90 tahun 2019)									
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)									
5	01	03	2	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran konsistensi program RKPD ke APBD bidang ekonomi dan SDA pada sub bidang lingkungan hidup, pertanian			100%			100%		
						PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA									
						Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Menurunkan tingkat kemiskinan	100%	90%	100%	100%				
						PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER									



KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGATAN S/D DENGAN TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
						DAYA ALAM									
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	Penjabaran konsistensi program RKPD ke APBD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100%	100%						
						PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PENGEMBANGAN MANUSIA									
						Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Penjabaran konsistensi program RKPD ke APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%						
						Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Aparatur	Penjabaran konsistensi program RKPD ke APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%						
						Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM	Penjabaran konsistensi program RKPD ke APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%						
						(Permendagri No. 90 tahun 2019)									
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN									
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan									



KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGATAN S/D DENGAN TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2020)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota	Dokumen RKPD Kota Denpasar; Dokumen RPJMD Kota Denpasar			100%			100%		
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									
5	01	03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya dokumen perencanaan Kota Denpasar			100%			100%		





## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### ***Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi***

Berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Denpasar. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
  - a. Subag Umum dan Kepegawaian
  - b. Subag Keuangan
  - c. Subag Perencanaan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
  - a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
    2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
    3. Sub Bidang Data dan Pelaporan
  - b. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
    2. Sub Bidang Pengembangan SDM
    3. Sub Bidang Pengembangan Kesra
  - c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
    2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
    3. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian dan Perikanan
  - d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang terdiri dari :
    1. Sub Bidang PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
    2. Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan
    3. Sub Bidang Kominfo dan Kecamatan





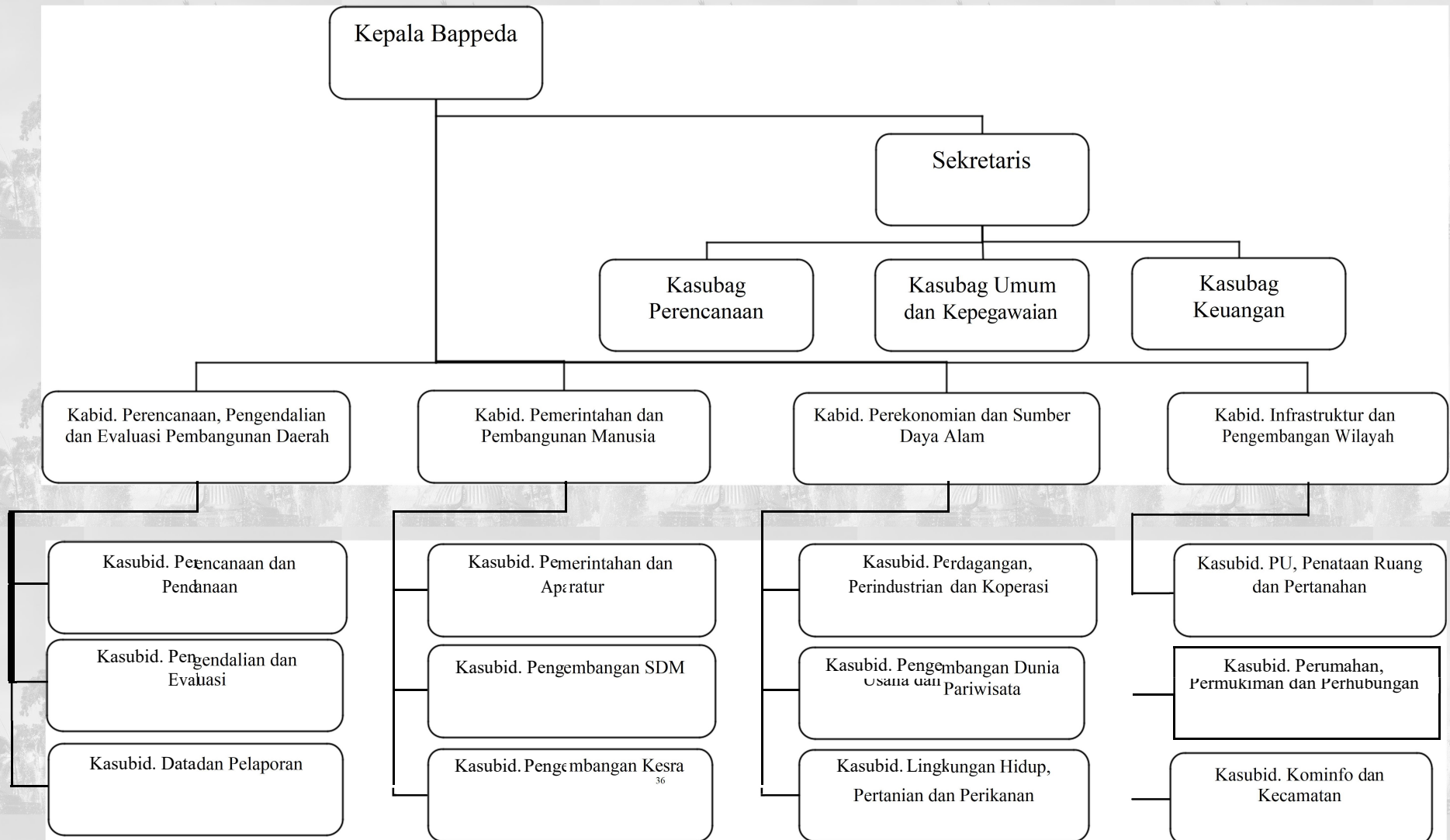
Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- Membuat perumusan kebijakan teknis bidang tata usaha, sosial budaya, perekonomian, sarana dan prasarana wilayah, pemerintahan dan aparatur, pendataan dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan.
- Menyusun pedoman teknis perencanaan pembangunan, kriteria teknis, norma standar, prosedur dan manual.
- Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program perencanaan pembangunan.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.





## STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA DENPASAR







### **Permasalahan**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kota Denpasar yang membantu Walikota Denpasar dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan





pembangunan daerah di Kota Denpasar mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kota Denpasar.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Denpasar dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat Perangkat Daerah yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;





6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.





## Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar 2022

**Tabel 2.3.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Kota Denpasar**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Sebelum Perubahan</b>												
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	0%	80%	90%	100%	0%	80%	90%		
<b>Perubahan Tahun 2018</b>												
1	Nilai Komponen Perencanaan dan Pengukuran SAKIP Pemerintah	-	-	38 point	45 point	47 point	51 point	-	-			
<b>Perubahan Tahun 2019 dan 2020</b>												
1	Persentase Sinergitas Perencanaan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Persentase Konsistensi Perencanaan	-	-	100%	100%	100%	100%	99,3%	92,77%			
3	Persentase Capaian Target Indikator Kinerja Utama Walikota	-	-	75%	75%	75%	75%	70,37%	42,88%			





## **2.1. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA**

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang republic Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan , partisipatif dan akuntabel.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dirumuskan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah :

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif , Tematik , Spasial belum optimal.





2. Sinergitas perencanaan pembangunan belum optimal
3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program
4. Belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel.

## **2.2. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Sesuai UU Nomor 25 tahun 2004, Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Denpasar disusun dengan berpedoman kepada Renstra Bappeda Kota Denpasar dan mengacu kepada RKPD Kota Denpasar. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kota Denpasar terdiri dari 3 (Tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yaitu :





**Tabel 2.4.**  
**Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022**  
**Kota Denpasar**

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	7.307.860.169	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Kota Denpasar	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	7.307.860.169	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda Kota Denpasar	Jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia	100%	903.540.424	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia	100%	903.540.424	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Kota Denpasar	Layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100%	226.000.000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Kota Denpasar	Layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100%	226.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Kota Denpasar	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	490.668.382	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Kota Denpasar	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda Kota Denpasar	Mobil jabatan yang layak digunakan	100%	468.163.208	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda Kota Denpasar	Mobil jabatan yang layak digunakan	100%	468.163.208	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Penting
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda Kota Denpasar	Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	207.932.524	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda Kota	Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	207.932.524	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda Kota Denpasar	Gedung kantor dalam kondisi baik	100%	163.309.488	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda Kota	Gedung kantor dalam kondisi baik	100%	163.309.488	
2	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>					<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>					
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					
	- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Bappeda Kota Denpasar	Berita acara kesepakatan hasil pelaksanaan musrenbang RKPD	100%	20.651.200	- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Bappeda Kota Denpasar	Berita acara kesepakatan hasil pelaksanaan musrenbang RKPD	100%	20.651.200	
	- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Denpasar	Tersedianya dokumen RKPD dan RPJMD Kota Denpasar	100%	159.497.520	- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Denpasar	Tersedianya dokumen RKPD dan RPJMD Kota Denpasar	100%	159.497.520	
	- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Tersedianya dokumen isu strategis dan buku bunga rampai	100%	632.025.400	- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Tersedianya dokumen isu strategis dan buku bunga rampai	100%	632.025.400	
	Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah										
	- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Konsumsi yang tersedia	100%	59.611.000	- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Konsumsi yang tersedia	100%	59.611.000	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										
	- Penyusunan profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Bappeda Kota Denpasar	Tersedianya profil pembangunan daerah kabupaten / kota	100%	68.046.000	- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Bappeda Kota Denpasar	Tersedianya profil pembangunan daerah kabupaten / kota	100%	68.046.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Penting
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kota Denpasar	Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	100%	73.308.788	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kota Denpasar	Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	100%	73.308.788	
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	100%	45.579.788	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	100%	45.579.788	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Denpasar	Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang perekonomian	100%	73.309.004	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Denpasar	Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang perekonomian	100%	73.309.004	
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda Kota Denpasar	Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang SDA	100%	45.579.788	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda Kota Denpasar	Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang SDA	100%	45.579.788	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Denpasar	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%	559.333.000	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Denpasar	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%	1.150.000.000	



No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Penting
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Denpasar	Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	100%	73.309.004	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Denpasar	Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	100%	73.309.004	
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Bappeda Kota Denpasar	Belanja Jasa Konsultansi Evaluasi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	100%	107.949.000	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Bappeda Kota Denpasar	Belanja Jasa Konsultansi Evaluasi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	100%	107.949.000	
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar	Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang kewilayahan	100%	73.309.004	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar	Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang kewilayahan	100%	73.309.004	
<b>Total Pagu Indikatif</b>					<b>11.758.982.691</b>	<b>Total Pagu Indikatif</b>					<b>11.758.982.691</b>





### **2.3. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Program/kegiatan/sub kegiatan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas ( bottom – up planning ) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi , baik dari kelompok masyarakat , LSM asosiasi – asosiasi , maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program dalam Renja Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar akan memverifikasi usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Dengan catatan program dan kegiatan yang diusulkan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar .





## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kenijakan Nasional

#### **3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Tahun 2022 tertuang Hal – hal sebagai berikut :

#### **TEMA PEMBANGUNAN :**

#### **“PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL”**

##### **PRIORITAS NASIONAL**

##### **PRIORITAS I**

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

##### **PRIORITAS 2**

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin





Pemerataan

**PRIORITAS 3**

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

**PRIORITAS 4**

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

**PRIORITAS 5**

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

**PRIORITAS 6**

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

**PRIORITAS 7**

Mengebangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Sedangkan yang menjadi Tema dan prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2022 adalah:

**“PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI MENUJU  
DENPASAR MAJU.”**

Prioritas 1: Pendidikan dan Kesehatan

Prioritas 2: Sosial dan ketenagakerjaan

Prioritas 3: Ekonomi dan Pariwisata

Prioritas 4: infrastruktur

Prioritas 5: Reformasi Birokrasi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Kota Denpasar Tahun 2022, Renja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022 tidak mendukung secara langsung prioritas Pembangunan Nasional maupun Kota, sesuai dengan





tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi serta Kota Denpasar tahun 2022 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi , rencana kerja dan pendanaan , baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Denpasar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Bappeda Kota Denpasar 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :





**TUJUAN :**

“Terwujudnya Perencanaan pembangunan Kota Denpasar yang Berkualitas  
, Bersinergi dan Kredibel “

**SASARAN :**

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar

**Indikator Sasaran :**

1. Presentase sinergitas perencanaan Kota Denpasar / 100%
2. Presentase konsistensi perencanaan /100%
3. Presentase capaian program /80 %

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2022**

NO	REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4
1	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1	5.01.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.307.860.169
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	5.01.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.000.000
3	5.01.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	903.540.424
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
4	5.01.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	490.668.382
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5	5.01.01.2.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	468.163.208
6	5.01.01.2.09.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163.309.488
7	5.01.01.2.09.09	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	207.932.524





## Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar 2022

<b>II</b>	<b>5.01.02.2</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
8	5.01.02.2.01.05	- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	20.651.200
9	5.01.02.2.01.07	- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	159.497.520
10	5.01.02.2.01.01.	- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	632.025.400
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
11	5.01.02.2.03.03	- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	59.611.000
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
12	5.01.02.2.02.03	- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	68.046.000
<b>III</b>	<b>5.01.03</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
13	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	73.308.788
14	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	45.579.788
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
15	5.01.03.2.02.04	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	73.309.004
16	5.01.03.2.02.08	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	45.579.788
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
17	5.01.03.2.03.01	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	559.333.000
18	5.01.03.2.03.04	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	73.309.004
19	5.01.03.2.03.05	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	107.949.000
20	5.01.03.2.03.08	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	73.309.004
		<b>Jumlah</b>	<b>11.758.982.691</b>





**Tabel 3.2.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Kota Denpasar**

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

Kode						Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>								
5	01	01	2	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</i>							
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Bappeda Kota Denpasar	100%	7.307.860.169,00	DAU dan PAD		100%	8.038.646.185,00
5	01	01	2	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah</i>							
5	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bappeda Kota Denpasar	100%	490.668.382,00	PAD		100%	539.735.220,00
5	01	01	2	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>							



Kode						Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Kota Denpasar	100%	226.000.000,00	PAD		100%	248.000.000,00
5	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	Bappeda Kota Denpasar	100%	903.540.424,00	PAD		100%	993.864.466,00
5	01	01	2	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>							
5	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bappeda Kota Denpasar	100%	468.163.208,00	PAD		100%	514.979.528,00
5	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Bappeda Kota Denpasar	100%	163.309.488,00	PAD		100%	179.640.436,00
5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor	Bappeda Kota Denpasar	100%	207.932.524,00	PAD		100%	228.725.776,00
5	01	02	2			<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah</b>							
5	01	02	2	01		<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan kegiatan</i>							
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Terlaksananya kegiatan musrenbang Kota Denpasar	Bappeda Kota Denpasar	100%	20.651.200,00	PAD		100%	22.716.320,00



Kode						Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Penjabaran penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Bappeda Kota Denpasar	100%	159.497.520,00	PAD		100%	175.447.272,00
5	01	02	2	01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen isu strategis dan buku bunga rampai	-	-	632.025.400,00	PAD		100%	695.227.940,00
5	01	02	2	03		<i>Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>							
5	01	02	2	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	100%	59.611.000,00	PAD		100%	65.572.100,00
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Bappeda Kota Denpasar	1 dokumen	68.046.000,00	PAD		1 dokumen	74.850.600,00
5	01	03				<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Penjabaran dan Sinkronisasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							



Kode						Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
5	01	03	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	Bappeda Kota Denpasar		73.308.788,00	PAD		100 %	80.639.66,00
5	01	03	2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar		45.579.788,00	PAD		100 %	50.137.766,00
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penjabaran Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							
5	01	03	2	02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang perekonomian	Bappeda Kota Denpasar		73.309.004,00	PAD		100%	80.639.904,00
5	01	03	2	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang SDA	Bappeda Kota Denpasar		45.579.788,00	PAD		100%	50.137.766,00
5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penjabaran perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan							



Kode						Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Denpasar	100%	559.333.000,00	PAD		100%	615.266.300,00
5	01	03	2	03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Persentase dokumen evaluasi perencanaan pelaksanaan pembangunan bidang kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar		107.949.000,00	PAD		100%	118.743.900,00
5	01	03	2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Denpasar		73.309.004,00	PAD		100%	80.639.904,00
5	01	03	2	03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar		73.309.004,00	PAD		100%	80.639.904,00





## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Kota Denpasar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Denpasar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

### **4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023.





#### 4.2. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Kota

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2022 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2022 serta Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2022, maka dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengkoordinasikan penyusunan , pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah , Bappeda Kota Denpasar tidak secara langsung mendukung Prioritas Kota Denpasar namun dalam kaitannya dengan pencapaian Program Prioritas Kota Denpasar dimaksud, Bappeda berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang meruokan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP ( Nasional ) dan RKPD ( Provinsi ) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana daerah , rencana kerja dan pendanaannya , baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada tahun 2022 program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kota Denpasar terdiri dari 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan yaitu :

#### 4.3. Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian di atas . rencana kerja dan kegiatan prioritas Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022, adalah sebagai berikut :





## Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar 2022

**Tabel. 4.1 Prioritas Perangkat Daerah**

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan / Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5 dokumen	Denpasar	<b>5.01.02.2</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	939.831.120	5 Dokumen terdiri dari : a. Dokumen RKPD Tahun 2022 b. Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2022 c. Dokumen LKPJ d. Profil Pembangunan Daerah e. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi
			5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	812.174.120	
			5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	59.611.000	
			5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	68.046.000	
Sinkronisasi dan Konsistensi dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota	100 %	Denpasar	<b>5.01.03</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	1.051.677.376	Keselarasan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2022
			5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	118.888.576	
			5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	118.888.576	
			5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	813.900.008	





## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kaidah- kaidah pelaksanaan**

Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022 , merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kota Denpasar secara bersama- sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya ;
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022

### **5.2 Rencana Tindak Lanjut**

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Denpasar, 18 Juni 2021  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kota Denpasar

I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT  
Pembina Tingkat I  
NIP :19671007 199703 1 004